

SUKSMA

Mendasar dan Menggugah

Editorial : Suksma itu!	1-5
Kompetensi Inti Psikolog	7-18
A. Supratiknya	
Kisah-Kisah Pribadi di Ruang Publik	19-28
V. Didik Suryo Hartoko	
Psikologi dan Pendekatan Kualitatif Deskriptif, Meretas Tabu-Tabu Metodik dalam Kajian Perilaku	29-38
Agus Suwignyo	
Psikologi Sebagai Studi Tentang Aspek Mental Bahasa	39-46
Christina S. Handayani	
Tinjauan Buku : Manusia Menjadi Tuhan?	47-49
A. Supratiknya	
Biodata Penulis	50

KOMPETENSI INTI PSIKOLOG

A. Supratiknya

Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Abstract

As a profession Psychology needs to define its professional jurisdiction, namely its special tasks and services. The definition of the types of competencies of psychologists will help to define the professional jurisdiction of Psychology as a profession as well as to provide a clear direction for the education of psychologists.

This article presents a model of six core competencies of psychologists which comprises those in: (1) relationship, (2) assessment, (3) intervention, (4) research and evaluation, (5) consultation and education, (6) management and supervision. This model has been adopted from the higher education system in Psychology in the United States (Bent, 1991; Weis, 1991). It also presents two scenarios for the curriculum development of higher education of Psychology to accomodate the six core competencies of psychologists, based on Kurikulum program Sarjana Psikologi 1994.

Kata Kunci: *professional jurisdiction, professional project, competency-based curriculum, performance-based curriculum, content-based curriculum, kompetensi inti*

1. Pendahuluan

Sejak tahun 1994 pendidikan tinggi psikologi di Indonesia pada jenjang Strata-1 menerapkan kurikulum dengan model *segregatif*. Pendidikan psikologi pada jenjang yang setara dengan *undergraduate* ini dipisahkan menjadi kurikulum Program Sarjana Psikologi yang merupakan pendidikan akademik dengan beban studi 144-160 *satuan kredit semester* (sks) dan dapat diselesaikan dalam delapan semester serta Program Profesi Psikolog dengan beban studi 24 sks dan dapat diselesaikan dalam 3-4 semester. Gagasan untuk memilah pendidikan Strata-1 Psikologi menjadi Program Sarjana Psikologi dan Program Profesi Psikolog ini konon pertama kali dilontarkan dalam rapat Konsorsium Ilmu Psikologi tanggal 13-14 Januari 1989 di Jakarta (Setiadi, 1998). Keputusan ini tampaknya terkait dengan pemisahan antara "Psikologi sebagai ilmu" dan "Psikologi sebagai profesi" atau yang dikenal dengan sebutan *the scientist-practitioner split* yang sudah mulai berlangsung di Amerika Serikat sejak awal abad ke-20 serta menghangat kembali pada dasawarsa 1980-an dan terus berlanjut hingga kini (Rice, 1997). Di Amerika Serikat "Psikologi sebagai ilmu" didukung

oleh para psikolog akademikus yang berkecimpung di bidang penelitian baik murni maupun terapan. Jumlah mereka lebih sedikit dibanding kelompok kedua. Sebaliknya, "Psikologi sebagai profesi" didukung oleh psikolog profesional yang berkecimpung di bidang praktek penyediaan jasa layanan psikologis baik lewat lembaga maupun privat yang dari segi jumlah merupakan mayoritas (Rice, 1997). Kurikulum model segregatif seperti Kurikulum 1994 secara *de facto* memungkinkan seseorang membatasi studinya pada Program Studi Psikologi hanya sampai Program Pendidikan Sarjana Psikologi—berarti memilih jalur "Psikologi sebagai ilmu"—dan mengembangkan karir sebagai ilmuwan Psikologi. Namun semangat Kurikulum 1994 sendiri tampaknya memandang kedua komponen program pendidikan jenjang Sarjana tersebut sebagai satu rangkaian utuh. Untuk menjadi psikolog yang purna—entah sebagai "ilmuwan Psikologi" (tidak harus diidentikkan dengan Sarjana Psikologi, disingkat *S.Ps*) atau lebih-lebih sebagai "profesional Psikologi" (tidak harus diidentikkan dengan Psikolog, disingkat *Ps*)—seseorang perlu menempuh baik komponen pertama yang juga disebut *jenjang S-1* maupun komponen kedua yang juga disebut *jenjang S-1*

plus (Setiadi, 1998). Keuntungan dari cara pandang ini ialah bahwa sosok Psikologi sebagai suatu bidang profesi dapat dipertegas sekalipun tetap memberi kebebasan kepada para lulusannya untuk memilih mengembangkan karir sebagai "ilmuwan Psikologi" atau "profesional Psikologi". Tulisan ini memang terpaksa memilih bertolak dari cara pandang "Psikologi sebagai profesi", sebab hal ini akan memiliki implikasi langsung yang setidaknya lebih memudahkan bagi upaya penjabaran dan pengelolaan kurikulum pendidikan atau *pre-service training*-nya.

2. Psikologi Sebagai Profesi

Seperti okupasi atau jenis-jenis pekerjaan lainnya, sebagai suatu profesi Psikologi mau tidak mau perlu merumuskan bahkan memperjuangkan sedikitnya lima hal yang sering dipandang sebagai unsur-unsur yang memberikan batasan tentang sosok suatu profesi (Rice, 1997). Pertama, sebagai profesi Psikologi perlu menegaskan status serta "kekuasaan" atau kewenangannya. Setiap profesi memiliki apa yang disebut *professional jurisdiction*, yaitu wilayah kerja berupa gugusan tugas dan layanan atas mana suatu profesi berusaha memiliki kontrol sebanyak mungkin. Usaha ini lazim dilaksanakan lewat apa yang disebut *professional project*, yaitu upaya suatu profesi untuk memegang kontrol eksklusif atas suatu bidang keahlian demi mendapatkan monopoli atas jenis-jenis aktivitas kerja tertentu berikut peningkatan status sosial yang menyertainya, bagi para anggotanya. Selanjutnya hegemoni yurisdiksi ini perlu dilegitimisasikan dalam bentuk pengakuan oleh otoritas yang memiliki kewenangan baik dari segi keahlian maupun dari segi hukum termasuk pemerintah, lewat akreditasi (khususnya bagi lembaga) dan pemberian lisensi (khususnya bagi perorangan). Kedua, Psikologi perlu memiliki komoditas yang jelas seperti lazimnya dimiliki oleh suatu profesi atau bidang keahlian khusus tertentu, berupa "*a specialized body of knowledge that provides an intellectual base for practice and not simply an apprenticeship system*" (Rice, 1997: 1174). Ketiga, Psikologi perlu memiliki otonomi, yaitu klaim atau penegasan bahwa sebagai profesi Psikologi memiliki

kontrol eksklusif atas proses pendidikan-pelatihan baik *preservice-training* bagi para calon psikolog maupun *inservice-training* bagi para psikolog yang ingin menyegarkan atau meningkatkan kompetensinya serta atas penyelenggaraan praktek jasa layanan psikologis oleh para psikolog yang menjadi anggotanya. Dengan kata lain, seorang praktisi dalam suatu profesi tidak semestinya dilatih, disupervisi dan dievaluasi oleh pihak entah berupa lembaga atau perorangan yang berasal dari luar profesi yang bersangkutan. Keempat, sebagai profesi Psikologi juga harus memiliki klien berupa perorangan, kelompok atau lembaga yang membutuhkan jasa layanan khusus atau memiliki jenis permasalahan tertentu yang dipandang merupakan bentuk-bentuk permasalahan khas yang siap dilayani oleh para praktisi profesional di bidang Psikologi. Kelima dan terakhir, sebagai profesi Psikologi perlu memiliki organisasi profesi. Organisasi profesi semacam ini memiliki tugas khusus memperjuangkan kepentingan para anggotanya, teristimewa dalam rangka melaksanakan *professional project* dari profesi yang bersangkutan.

Untuk memenuhi unsur-unsur di atas, khususnya pelaksanaan *professional project*, perumusan komoditas, dan penegakan otonomi, penyelenggaraan pendidikan Psikologi perlu didasarkan atas sejumlah kompetensi yang dipandang khas bagi seorang calon psikolog. Di samping itu, upaya mengidentifikasi dan merumuskan aneka kompetensi khas psikolog ini sekaligus akan sejalan dengan tuntutan baru untuk menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi atau kinerja (*competency* atau *performance-based curriculum*). Model kurikulum semacam ini didasarkan pada pandangan bahwa di dalam pembelajaran—lebih-lebih dalam rangka mempersiapkan praktisi yang ahli di dalam suatu profesi—penguasaan pengetahuan belaka tidaklah memadai. Pengetahuan harus diwujudkan dalam perbuatan nyata.

Kurikulum tidak lagi cukup hanya memuat daftar mata pembelajaran seperti lazim terjadi dalam model kurikulum berbasis isi (*content-based curriculum*) dan yang banyak dianut selama ini, melainkan harus mencakup antara lain unsur-unsur sebagai berikut (Houston, 1974): (1) perumusan tentang aneka

kompetensi, yaitu kombinasi antara pengetahuan, ketrampilan dan perilaku (sikap), yang harus ditunjukkan oleh peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran; (2) penentuan kriteria yang harus digunakan untuk menilai aneka kompetensi tersebut; (3) sistem penilaian atas pencapaian atau penguasaan aneka kompetensi oleh peserta didik dengan menggunakan kinerja sebagai indikator utama.

Tulisan ini bermaksud memaparkan rumusan aneka kompetensi inti psikolog serta kemungkinan pengolahan aneka kompetensi tersebut lewat berbagai mata kuliah yang tersedia di dalam kurikulum Program Sarjana Psikologi yang meliputi program pendidikan akademik Sarjana Psikologi dan program Profesi Psikolog. Dalam Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi antara lain dinyatakan bahwa kurikulum inti setiap program studi tidak lagi ditetapkan oleh Mendiknas melainkan oleh kalangan Perguruan Tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan (Ps. 6, Ay. 2) dan bahwa dengan berlakunya Keputusan di atas maka kurikulum inti yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi pada berbagai jenjang program yang ditetapkan dengan Keputusan Mendikbud/Mendiknas masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya kurikulum inti baru oleh kalangan Perguruan Tinggi bersama masyarakat profesi dan pengguna lulusan (Ps. 7). Karena kurikulum inti baru seperti dimaksud hingga kini memang belum tersedia maka—sesuai ketentuan di atas—dalam tulisan ini masih dipakai kurikulum program Sarjana Psikologi 1994 sebagai acuan.

3. Kompetensi Inti Psikolog

Yang dimaksud dengan kompetensi – dalam hal ini kompetensi Psikolog – adalah *"fundamental clusters of integrated KNOWLEDGE, SKILLS, and ATTITUDES that are used in practice applications by the professional psychologists"* (Bent, 1991: 77; huruf kapital oleh penulis). Kompetensi atau lebih tepat rangkaian kompetensi ini disebut KOMPETENSI INTI sebab dipandang merupakan serangkaian kompetensi fungsional kunci (*key functional competencies*) bagi

para psikolog yang diharapkan dapat menjadi inti atau fondasi serta *"a flexible guide for curriculum development"* bagi pengembangan aneka program pendidikan Psikologi sebagai suatu profesi.

Harus diakui, rumusan tentang serangkaian kompetensi inti psikolog yang akan dipaparkan di sini sepenuhnya diambil-alih dari rumusan yang pernah disusun oleh para pakar pendidikan Psikologi di Amerika Serikat yang tergabung dalam *National Council of Schools of Professional Psychology*. Lewat serangkaian konferensi yang dilakukan antara tahun 1978-1990, khususnya dalam Mission Bay Conference pada tahun 1987 berhasil dirumuskan *"six identifiable competency areas"* yang kemudian dikukuhkan dan disempurnakan dalam San Antonio Conference pada tahun 1989-1990 (Bent, 1991; Weiss, 1991). Perlu dikemukakan pula, di Amerika Serikat sendiri pengembangan kurikulum inti dalam psikologi profesional yang didasarkan pada rumusan tentang enam bidang kompetensi tersebut bukan tidak mengalami perlawanan dan penolakan. Namun akhirnya ternyata disepakati bahwa *core competency areas* yang dimaksud perlu dijadikan *"the organizing principle for curriculum construction"* di bidang pendidikan psikologi profesional (Weiss, 1991). Oleh karena itu pemaparan kompetensi inti psikolog hasil adopsi dari sistem pendidikan asing berikut ini perlu disikapi lebih sebagai tawaran yang perlu dikritisi secara cermat dari berbagai segi, khususnya dari segi sifat memadai-tidaknya ditinjau dari konteks kehidupan di Indonesia. Atau, setidaknya diharapkan bisa memberikan inspirasi untuk – jika memang diperlukan – mencoba menyusun perumusan sendiri.

Kompetensi inti psikolog yang dimaksud ada enam buah, yaitu: (1) relasi; (2) asesmen; (3) intervensi; (4) penelitian dan evaluasi; (5) konsultasi dan pendidikan; serta (6) manajemen dan supervisi. Uraian lebih rinci tentang masing-masing kompetensi inti tersebut adalah sebagai berikut.

a. Relasi

Kompetensi relasi adalah kemampuan mengembangkan dan memelihara relasi atau hubungan kerja yang konstruktif dengan klien (Polite dan Bourg, 1991).

Pentingnya kompetensi ini bagi seorang psikolog profesional tidak perlu diragukan. Sebagian besar—untuk tidak mengatakan hampir semua—fungsi yang dilakukan seorang psikolog profesional didasarkan pada kemampuan dasar untuk membina, memahami, dan memelihara relasi yang otentik atau tulus-lugas serta efektif-mengena dengan klien. Dalam rumusan kita sendiri, seorang Psikolog pada dasarnya adalah seorang komunikator alias pembangun atau pengembang komunikasi atau relasi baik dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai fasilitator-*trainer*-edukator maupun sebagai konselor-terapis. Hampir semua problem psikologis yang dialami oleh perorangan, kelompok maupun lembaga sedikit atau banyak, langsung atau tidak langsung berakar pada masalah komunikasi atau relasi. Selain itu, kompetensi relasi juga merupakan fondasi atau prasyarat bagi semua kompetensi inti psikolog yang lain (Polite & Bourg, 1991).

Unsur *knowledge* atau pengetahuan dari kompetensi relasi mencakup sedikitnya tiga hal (Polite & Bourg, 1991). Pertama, pengetahuan tentang *data base* psikologis yang relevan, meliputi aneka teori dan hasil-hasil penelitian tentang relasi atau komunikasi antar pribadi serta *body of knowledge* tentang berbagai bidang psikologi baik yang tradisional seperti psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi abnormal, psikologi industri, maupun yang baru berkembang seperti psikologi hukum, psikologi forensik, dan sebagainya. Kedua, pemahaman diri meliputi pengetahuan atau kesadaran tentang aneka sifat-kemampuan, kelebihan-kekuatan, kekurangan, motivasi, dan sebagainya, yang akan mempengaruhi kemampuan dan corak kita dalam membangun relasi atau komunikasi dengan orang lain. Ketiga, pengetahuan tentang orang lain berupa pemahaman tentang aneka konteks tempat klien berasal dan hidup meliputi baik mikrosistem seperti kekhususan individual maupun makrosistem seperti lingkungan budaya, dan sebagainya.

Unsur *skills* atau ketrampilan dari kompetensi relasi mencakup segugusan ketrampilan yang lazim disebut *interpersonal skills* (Polite & Bourg, 1991). Gugusan

keterampilan ini meliputi, namun tidak terbatas pada, kemampuan-kemampuan: (a) membangun *rapport* atau relasi yang hangat dan akrab dengan klien dalam situasi psikologis tertentu seperti *testing* atau konseling; (b) membuat lawan komunikasi merasa terlibat di dalam relasi yang sedang dikembangkan; (c) membuat lawan komunikasi merasa nyaman; (d) mengkomunikasikan empati; (e) mengkomunikasikan sikap menghargai dan menghormati lawan komunikasi; dan sebagainya.

Unsur *attitudes* atau sikap meliputi namun tidak terbatas pada (Polite & Bourg, 1991): (a) curiositas atau dahaga intelektual; (b) fleksibilitas atau kelenturan, khususnya dalam berpikir; (c) skeptikisme atau sikap tidak mudah percaya, tidak mudah puas menyangkut hal-hal yang bersifat keilmuan; (d) berpikiran terbuka; (e) apresiasi atau pengakuan sekaligus penghargaan terhadap keberagaman individual maupun budaya; (f) kesehatan psikologis; (g) integritas dan kejujuran-ketulusan; dan (h) kerelaan untuk melayani orang lain.

b. Asesmen

Yang dimaksud dengan asesmen adalah proses yang berkelanjutan, interaktif dan inklusif – dalam arti melibatkan pihak yang sedang menjalani asesmen – dengan tujuan untuk menyusun deskripsi, konseptualisasi, karakterisasi serta prediksi tentang aspek-aspek tertentu yang relevan dari seorang klien (McHolland, dalam Gold & De Piano, 1991). Kompetensi asesmen ini masih dipandang unik serta merupakan salah satu fondasi penting bagi fungsi dan identitas seorang psikolog profesional kendati dalam beberapa dasa warsa terakhir telah menjadi sasaran kritik dan ketidak-kepuasan yang berasal baik dari dalam maupun dari luar kalangan profesi psikologi. Salah satu sumber utama dari kelemahan dalam penyelenggaraan asesmen sehingga menimbulkan reaksi tidak puas dari pihak pemakai maupun pengamat kiranya adalah tidak dimilikinya wawasan yang memadai dan jernih tentang hakikat dan sejarah asesmen dalam pelayanan psikologis. Oleh karena itu, kompetensi asesmen dipandang memiliki tiga unsur penting, yaitu pemilikan wawasan yang jernih tentang hakikat dan sejarah asesmen serta pemilikan pengetahuan dan ketrampilan yang relevan secara

memadai agar para psikolog profesional yang dihasilkan mampu menanggapi secara tepat kebutuhan masyarakat akan asesmen (Gold & De Piano, 1991).

Unsur *wawasan* harus mampu membekali para calon psikolog dengan pemahaman tentang sejarah asesmen – khususnya sebagaimana berlangsung di negara yang termasuk sebagai tempat asesmen mula-mula muncul dan berkembang, yaitu Amerika Serikat – serta hakikatnya. Muncul dan berkembangnya *psychological testing* pada paruh pertama abad ke-20 di Eropa dan Amerika dipandang ikut menandai mekarnya psikologi sebagai profesi, khususnya psikologi klinis. *Psychological testing and evaluation* sebagai sejenis kompetensi khas psikolog secara umum telah berhasil menempatkan psikolog pada posisi terhormat kala itu. Sekalipun di bidang intervensi atau penanganan gangguan mental, psikolog dengan kompetensi *psychological testing and evaluation*-nya hanya menempati peran subordinatif atau sekunder sebagai "*psychodiagnostic assistant*" bagi para psikoterapis yang umumnya berlatarbelakang pendidikan psikiatri. Akibatnya, konsep asesmen cenderung dipahami sebatas sebagai *testing* terhadap sasaran perorangan yang dilakukan pada awal proses intervensi dengan tujuan utama merumuskan suatu diagnosis. Konsep yang sempit dan cenderung ditinggalkan tentang asesmen ini dikenal sebagai model "*pretreatment testing*" tentang asesmen psikologis (Gold & De Piano, 1991).

Memasuki dasawarsa 1960-an, nilai, validitas dan persona asesmen psikologis mulai digugat oleh kalangan baik dari dalam maupun luar Psikologi. Selain itu, memasuki masa pasca Perang Dunia II peran psikolog mengalami pergeseran dari sekadar melakukan "*psychological testing and evaluation*" untuk mendukung intervensi yang dilakukan oleh pihak lain menjadi melakukan praktek psikoterapi itu sendiri. Psikolog makin memandang psikoterapi dan bentuk-bentuk intervensi lain sebagai aktivitas utama mereka. Akibatnya, status asesmen di kalangan psikolog sendiri sempat mengalami kemerosotan secara tajam.

Menghadapi aneka kritik dan kecenderungan baru, bidang asesmen bukannya menjadi surut melainkan

justeru melakukan aneka perubahan sejalan dengan kritik dan berbagai tuntutan baru, termasuk meningkatnya kebutuhan akan asesmen di aneka konteks lain selain terapi serta dengan klien yang semakin beragam pula, tidak terbatas pada klien perorangan. Muncullah model asesmen baru yang dikenal sebagai "*broad-based model*", yaitu model asesmen dengan pendekatan, sarana-alat, dan sasaran layanan yang diperluas dan disertai dengan ketrampilan memberikan konsultasi serta pemilihan kerangka konseptual tentang asesmen yang luas dan lentur sehingga mampu menanggapi aneka kebutuhan yang terus berkembang di tengah masyarakat (Gold & De Piano, 1991).

Unsur *pengetahuan* diarahkan untuk membekali calon psikolog dengan sejumlah konsep kunci model asesmen baru. Beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut (Gold & De Piano, 1991):

- 1) Psikolog yang kompeten harus mampu memilih dari aneka metode asesmen atau evaluasi, mana yang paling cocok dengan kasus yang sedang dihadapi, bukan sekadar mengandalkan secara otomatis dan dogmatis pada sejumlah tes formal yang sudah dikenal.
- 2) Dalam banyak kasus subyek evaluasinya bukan perorangan, melainkan pasangan, keluarga, organisasi, komunitas, atau sistem.
- 3) Aneka jenis ketrampilan asesmen harus bisa diterapkan pada banyak situasi selain evaluasi pratritmen, seperti evaluasi terhadap hasil tritmen, evaluasi program, serta aneka situasi atau problem lain yang terjadi dalam bidang nonklinis yang tidak terbatas.
- 4) Tujuan utama asesmen psikologis adalah memberikan pemahaman untuk mendasari perencanaan tindakan praktis tertentu dalam rangka intervensi atau pemecahan masalah, bukan sekadar menghasilkan klasifikasi diagnostik. Dalam banyak kasus atau situasi, jauh lebih diperlukan kemampuan mengidentifikasi aneka kekuatan dan kemampuan dalam diri klien yang dapat terus dimekarkan daripada mendeteksi berbagai kekurangan sekadar untuk keperluan kategorisasi.

5) Pembelajaran tentang asesmen tidak boleh hanya berkisar pada sejumlah tes dengan fokus pada aspek-aspek teknisnya seperti administrasi, skoring, dan interpretasinya, melainkan perlu juga diarahkan untuk membekali calon psikolog dengan landasan konseptual yang lebih fundamental tentang asesmen untuk menghindari penggunaan aneka teknik asesmen secara naif bahkan keliru serta agar memiliki sikap terbuka terhadap kemungkinan munculnya berbagai teknik dan prosedur asesmen yang baru.

Unsur *skills* di bidang kompetensi asesmen harus mencakup pelatihan tentang langkah-langkah dalam proses asesmen yang cenderung diabaikan, meliputi (Gold & De Piano, 1991):

- 1) Merumuskan *pertanyaan referral*, yaitu mengklarifikasi kepada sumber referral pertanyaan-pertanyaan yang diharapkannya akan terjawab oleh proses asesmen. Maka, psikolog perlu memiliki ketrampilan memberikan konsultasi untuk menolong sumber referral mengklarifikasi dan mengartikulasikan apa yang ingin diperolehnya atau apa yang hendak diputuskannya berdasarkan hasil asesmen. Berdasarkan pertanyaan referral yang jelas dan eksplisit, psikolog akan bisa menentukan jenis informasi yang perlu dikumpulkannya, teknik dan instrumen yang sesuai, serta aneka persoalan yang perlu dipecahkan berdasarkan hasil-hasil evaluasi.
- 2) Memilih metode. Menurut model asesmen dengan basis yang diperluas, selain *testing* ada banyak metode pengumpulan informasi yang juga memiliki fungsi sentral dalam evaluasi, khususnya wawancara, asesmen perilaku, serta metode-metode khusus untuk mengevaluasi pasangan, keluarga, organisasi, dan sistem. Dengan kata lain, asesmen harus bergerak ke arah menjadi semakin eklektik dalam arti mengandalkan kombinasi aneka metode dan teknik demi mendapatkan informasi paling lengkap dan akurat untuk menjawab pertanyaan referral.

- 3) Pengumpulan dan pemrosesan informasi. Ketrampilan ini meliputi penguasaan landasan konseptual tentang masing-masing jenis teknik asesmen, aplikasi atau penerapan setidaknya satu teknik tertentu mewakili masing-masing jenis teknik asesmen, serta penyusunan ringkasan hasilnya.
- 4) Merumuskan dan mengintegrasikan hipotesis-hipotesis interpretatif. Mahasiswa harus menyadari perbedaan antara data mentah yang dihasilkan oleh prosedur evaluasi dan kesimpulan interpretatif yang ditarik dari data tersebut. Data baru menjadi bermakna bila aneka implikasi interpretatifnya dirumuskan secara hipotetis dengan mengaitkannya dengan teori atau fakta empiris tertentu. Interpretasi pun akan menjadi semakin akurat bila dirumuskan berdasarkan kombinasi semakin banyak data yang diperoleh dari aneka sumber.
- 5) Diseminasi hasil. Nilai suatu asesmen pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan psikolog mengkomunikasikan hasil asesmen kepada subyek yang dievaluasi atau kepada sumber referral dengan cara yang sederhana, jelas, lugas, konsisten, dan yang terpenting, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan referral secara memadai.

c. Intervensi

Intervensi diartikan sebagai tindakan yang bertujuan mempromosikan dalam arti memasyarakatkan, memulihkan, mempertahankan, dan/atau meningkatkan fungsi positif dan rasa sejahtera klien lewat layanan-layanan yang bersifat preventif, developmental, dan/atau remedial (Bent & Cox, 1991). Intervensi mencakup bidang yang lebih luas dari sekadar psikoterapi. Psikoterapi atau konseling untuk perorangan yang melibatkan apa yang disebut "*individualized service planning*" memang tetap bisa menjadi bagian esensial dari kompetensi intervensi namun juga perlu dilengkapi dengan penguasaan atas aneka pendekatan intervensi yang berbentuk pengembangan program bagi kelompok-kelompok klien. Konsep klien perlu diperluas tidak terbatas pada individu melainkan juga bisa berupa pasangan, kelompok, organisasi, dan sebagainya. Karenanya, kompetensi intervensi juga harus mencakup

kemampuan menjalin relasi dengan berbagai pihak, seperti "*referral networking*" atau membangun jaringan dengan sumber-sumber referral serta "*collegial planning*", yaitu mengevaluasi dan merencanakan kiat-kiat meningkatkan keefektifan dalam memenuhi aneka kebutuhan klien atau sumber referral bersama pihak-pihak lain yang terkait. Selain itu, menurut pandangan baru tentang intervensi ini psikolog bukanlah pertama-tama seorang *psychotherapist* melainkan lebih merupakan seorang *human resources expert* yang tugas utamanya adalah menolong manusia mengatasi aneka problema hidup yang mengganggu rasa sejahteranya. Untuk itu metode-metode intervensi yang bersifat preventif-developmental perlu diutamakan seraya tidak boleh terpaku pada ranah diagnosis dan penyakit yang merupakan wilayah psikoterapi tradisional (Bent & Cox, 1991).

d. Penelitian dan Evaluasi

Penelitian lebih merupakan kegiatan mengumpulkan dan menafsirkan data untuk memperoleh informasi apa adanya, sedangkan evaluasi lazimnya melibatkan kegiatan membandingkan data dan/atau hasil penafsirannya dengan kriteria atau norma tertentu agar dapat menentukan kualitasnya dalam sejenis kontinum baik-buruk. Dapat dikatakan, evaluasi merupakan langkah lebih lanjut dari suatu penelitian. Artinya, evaluasi selalu melibatkan proses penelitian, sedangkan penelitian tidak selalu ditindaklanjuti dengan evaluasi.

Kompetensi penelitian dan evaluasi secara umum perlu mencakup unsur-unsur berikut ini (Trierweiler & Stricker, 1991):

- 1) Penguasaan pengetahuan dasar tentang filsafat ilmu, khususnya kesadaran eksplisit bahwa produksi suatu pengetahuan ilmiah pada dasarnya merupakan proses sosial dan politik. Merupakan proses sosial sebab melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Merupakan proses politik sebab pengetahuan memiliki implikasi kekuasaan bagi pihak yang memproduksi dan menguasainya.
- 2) Penguasaan pengetahuan dasar tentang statistik terapan dan teori pengukuran sebagai sarana

utama untuk meneliti konstruk-konstruk ilmiah dengan pendekatan populasi.

- 3) Penguasaan pengetahuan dasar tentang aneka desain penelitian mulai dari yang paling terkontrol seperti eksperimen laboratorium sampai yang paling kurang melibatkan kontrol seperti penelitian lapangan.
- 4) Penguasaan pengetahuan dasar tentang aneka metode penelitian kualitatif dengan fokus pada masalah reliabilitas dan validitas dalam mengumpulkan dan menafsirkan data kualitatif.
- 5) Penguasaan pengetahuan dasar tentang penerapan pendekatan penelitian yang khas untuk berbagai sasaran penelitian berupa baik sistem maupun individu, seperti pendekatan survei, penelitian evaluasi, studi kasus, dan sebagainya.
- 6) Penguasaan pengetahuan dasar tentang epistemologi pribadinya sendiri, berupa kesadaran tentang bias-bias pribadi, predileksi atau kecondongan-ketertarikan pada teori tertentu, perlunya memiliki sikap terbuka terhadap aneka cara memandang masalah beserta kelebihan-kekurangan dari masing-masing pendekatan itu, kesadaran tentang pentingnya mendukung suatu pandangan dengan bukti-bukti empiris tertentu seraya tetap mempertahankan sikap skeptis yang sehat, kesadaran tentang keterikatan penelitian pada etika, serta kesadaran tentang perlunya meminta masukan dan *feedback* dari teman-kolega untuk setiap penelitian yang dilakukan kendati pun sudah merupakan kegiatan rutin.
- 7) Penguasaan ketrampilan membuat laporan penelitian dan/atau laporan profesional secara mantab.

Secara khusus, seorang psikolog profesional merupakan seorang "*local clinical scientist*" atau "ilmuwan klinis lokal". Maksudnya, sebagai ilmuwan dia akan mengembangkan ciri-kecenderungan sebagai berikut: (1) menyangkut orientasi pengetahuan dan metode, dia lebih memilih menjadi seorang generalis daripada spesialis; (2) dalam melakukan penelitian dia akan lebih berfokus pada realitas-realitas lokal di mana data dikumpulkan sebagaimana berlaku pada suatu kasus

tertentu sehingga kemungkinan generalisasi pada kasus-kasus lain pun akan disikapinya sebagai terbatas; (3) memilih menumbuhkan jiwa atau sikap umum sebagai peneliti yang aktif, bukan sekadar puas karena memiliki keahlian teknis menyangkut aneka metode ilmiah tertentu (Trierweiler & Stricker, 1991).

e. *Konsultasi Dan Pendidikan*

Problem yang dihadapi oleh manusia dan masyarakat semakin kompleks. Keterkaitan antara berbagai problem yang dialami oleh individu atau kelompok dengan kehidupan komunitas bahkan dunia yang lebih luas pun semakin diakui. Tugas psikologi tidak lagi terbatas mengatasi problem-problem individual, melainkan lebih-lebih mengusahakan pemuliaan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat program-program yang bersifat preventif. Makna problem pun diperluas bukan terbatas pada aneka bentuk gangguan fungsi melainkan juga mencakup pemanfaatan aneka sumber daya yang kurang optimal maupun berbagai bentuk kegagalan mendapatkan kesempatan-peluang untuk berkembang secara penuh. Dengan kata lain, problem manusia-masyarakat tidak bisa hanya diatasi lewat bentuk-bentuk intervensi tradisional pada taraf perorangan, melainkan bahkan perlu dicegah lewat usaha-usaha konsultasi dan pendidikan yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok.

Pendidikan dalam konteks yang lebih luas bisa diartikan sebagai usaha memberikan fasilitasi secara terarah oleh seorang psikolog profesional dengan tujuan untuk menumbuhkan aneka pengetahuan, ketrampilan atau sikap tertentu di dalam diri individu atau kelompok yang menjadi sasaran pendidikan (Illback, Maher & Kopplin, 1991). Pendidikan selalu mengandung unsur pemberian pengaruh tertentu – khususnya dari pihak pendidik kepada peserta didik – dalam rangka mengatasi problem tertentu. Pendidikan dapat diberikan secara tatap muka dan langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan aneka media komunikasi, seperti media cetak, media audio/audio-visual, dan sebagainya. Apa pun media yang digunakan, pendidikan yang baik harus

dilaksanakan dalam kerangka desain instruksional yang didasarkan pada aneka kebutuhan peserta didik, dengan pemilihan materi serta metode pembelajaran yang sesuai, dan dilengkapi dengan sistem penilaian pencapaian hasil belajar yang memadai pula.

Sebaliknya, *konsultasi* adalah interaksi kolaboratif yang terencana antara psikolog profesional sebagai *konsultan* dan satu atau lebih klien atau kolega sebagai *konsulti* dalam rangka mengolah atau membahas suatu problem atau suatu program tertentu (Illback, Maher & Kopplin, 1991). Konsultasi pada dasarnya merupakan suatu proses intervensi juga, namun berbeda dari jenis atau bentuk intervensi yang lain seperti psikoterapi di sini si psikolog profesional sebagai konsultan tidak terlibat bahkan tidak memiliki kontrol langsung atas proses perubahan nyata yang berlangsung dalam diri konsulti. Sebagai intervensi, konsultasi berfokus pada kebutuhan konsulti berupa individu, pasangan, kelompok, program, organisasi, dan sebagainya. Tugas psikolog sebagai konsultan adalah menolong konsulti mengidentifikasi problem dan menemukan cara-cara solusinya lewat proses-proses pemberian pengaruh yang bersifat fasilitatif.

Maka, kompetensi pendidikan dan konsultasi perlu mencakup unsur-unsur berupa pengetahuan, sikap dan ketrampilan baik yang bersifat umum seperti kemampuan berkomunikasi, maupun yang bersifat lebih khusus seperti penguasaan berbagai pengetahuan teoretis-empiris yang mendasari konsultasi (misalnya, dinamika kelompok, kesehatan mental, teori organisasi) serta penguasaan aneka prinsip dan prosedur pengembangan desain instruksional.

f. *Manajemen dan Supervisi*

Yang dimaksud *manajemen* di sini adalah gugusan aktivitas yang bertujuan mengarahkan, mengorganisasikan dan menata, atau mengendalikan aneka layanan yang ditawarkan atau disediakan bagi publik khususnya oleh kalangan psikolog profesional (Bent, Schindler & Dobbins, 1991). Dengan kata lain, yang menjadi fokus di sini adalah penguasaan atas aspek-aspek manajerial dari praktek psikologi.

Kompetensi manajemen ini sedikitnya mencakup empat unsur (Bent, Schindler & Dobbins, 1991), yaitu:

- 1) *Self-management* atau manajemen diri sebagai seorang profesional. Tujuannya adalah melahirkan psikolog profesional yang baik. Psikolog profesional yang baik diharapkan mampu menjalankan praktek sesuai dengan pedoman-standar teknis dan etis yang berlaku, memenuhi berbagai kewajiban, memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain khususnya mereka yang dilayani, serta menjalani kehidupan pribadi secara sehat-wajar. Maka, manajemen diri ini perlu mencakup unsur-unsur: (1) manajemen perilaku profesional sesuai pedoman yang berlaku; (2) manajemen waktu; (3) memiliki skala prioritas khususnya memberikan prioritas yang tinggi pada hal-hal yang berkaitan dengan profesinya; (4) mengembangkan gaya hidup yang sesuai dengan profesinya.
- 2) Manajemen kasus. Intinya adalah manajemen klien, dengan memberikan perhatian pada segi-segi praktis, etis, legal, antar-disiplin dan antar-lembaga yang senantiasa akan muncul dalam menangani para klien. Unsur-unsurnya meliputi antara lain administrasi dan dokumentasi data kasus, perencanaan program layanan, membangun jaringan kerjasama dengan pihak/lembaga lain, dan sebagainya.
- 3) Manajemen profesi. Tujuannya adalah mengenalkan kepada calon psikolog standar, pedoman, dan kode etik yang diatur oleh profesi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan *professional project* seperti proses akreditasi, sertifikasi atau pemberian ijin praktek, dan sebagainya.
- 4) Sistem penyediaan layanan (*service delivery systems*). Tujuannya adalah mengenalkan bentuk-bentuk praktek pelayanan psikologis, seperti praktek pribadi, praktek dalam lembaga, dan sebagainya serta hal-hal yang terkait dengan praktek penyediaan layanan, seperti populasi sasaran yang dilayani, cara mengakses populasi

sasaran, penyediaan aneka sumber-sarana, perijinan, kendali mutu, dan sebagainya.

Supervisi adalah sejenis manajemen yang dikombinasikan dengan pengajaran, yang berlangsung di dalam relasi antara supervisor dan yang disupervisi serta yang diarahkan bagi peningkatan kompetensi pihak yang disupervisi (Bent, Schindler & Dobbins, 1991). Supervisi dapat dilakukan terhadap perorangan atau terhadap sekelompok orang. Kompetensi supervisi mencakup baik belajar menjadi subyek sasaran supervisi yang baik maupun belajar memberikan atau melakukan supervisi yang baik terhadap orang lain. Kedua pengalaman tersebut dapat diperoleh lewat berbagai kegiatan praktikum atau kerja praktek baik di dalam maupun di luar kampus. Yang pertama bisa didapat dengan cara menjalani praktikum atau tugas-tugas praktek lain dengan disupervisi oleh dosen, sedangkan yang kedua bisa didapat dengan cara memanfaatkan kesempatan untuk menjadi asisten praktikum dengan tugas pokok mensupervisi kegiatan praktek sekelompok mahasiswa junior.

4. Kurikulum 1994 Dan Kompetensi Inti Psikolog

Pertanyaannya kini, sejauh mana kurikulum program Sarjana Psikologi 1994 yang terdiri atas kurikulum Program Sarjana Psikologi dan kurikulum Program Profesi Psikolog dapat dipakai sebagai instrumen atau sarana untuk mewujudkan enam kompetensi psikolog di atas? Terlebih dulu ada beberapa hal yang perlu diberi catatan. Pertama, enam kompetensi psikolog di atas aslinya dimaksudkan untuk program pasca-sarjana, khususnya program doktor. Di negara asalnya itu konon pendidikan profesi psikolog memang diselenggarakan pada jenjang pascasarjana. Sedangkan di Indonesia, menurut konsepsi Kurikulum 1994 pendidikan program profesi psikolog dilaksanakan pada jenjang S-1 atau tepatnya segera sesudah jenjang S-1 sehingga disebut S-1 plus. Menurut hemat penulis, perbedaan jenjang ini tidak harus menimbulkan masalah besar. Keenam kompetensi inti psikolog tersebut tetap dapat diterapkan, hanya kedalaman pengolahannya perlu disesuaikan dengan tuntutan jenjang S-1 plus. Di pihak lain kita tahu, bahwa

di kalangan Fakultas Psikologi khususnya Universitas Negeri ada prakarsa untuk menempatkan program profesi psikologi pada jenjang S2 dengan nama program Magister Psikologi (Sinopsis Hasil Diskusi/Lokakarya, 2001). Bila hal ini sungguh terjadi, perbedaan jenjang bukan lagi masalah serius.

Kedua, struktur Kurikulum 1994 yang terdiri atas dua komponen tersebut perlu ditegaskan mengikuti struktur tertentu. Untuk mengakomodasikan kompetensi inti psikolog di atas, kiranya paling sesuai jika struktur Kurikulum 1994 ditegaskan menjadi berstruktur *tradisional* atau *piramida terbalik* (Perlman & McCann, 1999). Seperti diketahui, kurikulum semacam itu lazimnya diawali dengan satu mata kuliah *introductory* sebagai dasar piramida (terbalik), kemudian diikuti dengan matakuliah-matakuliah berisi *content* atau *method* yang bersifat wajib dan pilihan dalam jumlah cukup substansial dan membentuk badan piramida, serta diakhiri dengan satu atau beberapa mata kuliah integratif sebagai *capstone courses* atau *capstone experience* pada puncak piramida.

Bila struktur di atas kita terapkan pada Kurikulum 1994 sebagai sarana untuk mewujudkan enam kompetensi inti psikolog, dapat dipikirkan dua macam skenario. Skenario pertama, segregasi antara program Sarjana Psikologi dan program Profesi Psikolog dalam jenjang S1 dan S1-plus tetap dipertahankan. Jika skenario ini dipilih, matakuliah Psikologi Umum I dan II dapat dipakai sebagai *introductory courses*. Sebagian besar mata kuliah *content* dan *method* yang tergolong ke dalam kelompok MKDK dan MKK masih dapat dipertahankan dengan penyesuaian sehingga mampu mencakup berbagai unsur dari enam kompetensi inti psikolog. Sebagai contoh, kelompok mata kuliah Komunikasi sangat potensial diolah untuk membentuk kompetensi Relasi dan Pendidikan-Konsultasi. Kelompok mata kuliah Klinis-Abnormal sangat potensial diolah untuk membentuk kompetensi Intervensi, Manajemen-Supervisi, dan Relasi. Kelompok mata kuliah *methods* yang meliputi Metodologi Penelitian, Statistik, Psikometri/Pengukuran Psikologis dan Psikodiagnostika perlu ditata kembali agar mampu

membentuk kompetensi Asesmen, Penelitian dan Evaluasi secara lebih seimbang. Berbagai mata kuliah *content* lainnya dapat didistribusikan sesuai relevansinya untuk mengembangkan aspek *knowledge*, *attitudes*, dan *skills* dari enam kompetensi inti Psikolog. Akhirnya, komponen kurikulum pendidikan Profesi Psikolog dapat dipakai sebagai *capstone experience*. Sebagaimana pernah penulis kemukakan, komponen kurikulum ini sebaiknya dikembangkan dan diolah dengan pendekatan *problem-based learning* dan dengan *content* mencakup enam kompetensi inti Psikolog (Supratiknya, 2001). Bila skema ini bisa diterima, maka perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap mata kuliah Seminar, Penulisan Skripsi, dan mungkin Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dalam Kurikulum 1994 ketiga mata kuliah ini bisa dipandang berfungsi sebagai *capstone courses/experiences* untuk program pendidikan Sarjana Psikologi. Dalam skema baru, mata kuliah Seminar kiranya bisa dihilangkan atau diintegrasikan dengan kelompok mata kuliah Metodologi Penelitian sedangkan Penulisan Skripsi dan KKN bisa diintegrasikan ke dalam *capstone experiences* pada kompetensi Penelitian-Evaluasi dan kompetensi-kompetensi lainnya yang diolah dengan pendekatan pembelajaran berbasis problem pada komponen program pendidikan Profesi Psikolog.

Skenario kedua, segregasi antara dua program tersebut sekaligus disertai pemisahan jenjang, khususnya program Sarjana Psikologi tetap diselenggarakan pada jenjang S1 sedangkan program Profesi Psikolog diselenggarakan pada jenjang S2 seperti yang direncanakan. Kalau alternatif ini dipilih cukup dilakukan sejumlah penyesuaian pada skenario pertama. Mata kuliah Seminar, Skripsi dan KKN tetap dipertahankan sebagai *capstone experiences* pada program Sarjana. Sedangkan program Profesi Psikolog kendati dikelola secara mandiri pada jenjang S2 dan diselenggarakan dengan pendekatan *problem-based learning* seperti yang sudah disinggung, sebaiknya tetap dibuat *streamlined* dengan kurikulum program Sarjana Psikologi yang memang sudah berorientasi pada enam kompetensi inti psikolog.

Memang masih perlu dilakukan perumusan dan penjabaran secara lebih cermat dan rinci, namun

kesempatan tersebut kiranya cukup terbuka. Satu hal menjadi cukup pasti yaitu bahwa baik dengan skenario pertama maupun kedua, kurikulum Program Sarjana Psikologi pada dasarnya akan kembali bercorak integratif dan secara otomatis menuntut masa studi yang lebih panjang. Tentang yang terakhir sesungguhnya hal itu tidak perlu menimbulkan kerisauan sebab di Australia pun kecenderungannya adalah memperpanjang masa pendidikan formal persiapan untuk menjadi psikolog dari empat menjadi enam tahun sebab masa persiapan selama empat tahun dirasakan kurang memadai (Healy & Franklin, 1998).

Sebagai penutup, masih ada satu soal yang ingin penulis kemukakan. Selama ini pendidikan tinggi Psikologi pada jenjang setara S-1 diselenggarakan di dalam semangat dan tradisi *liberal arts* atau humaniora dengan tujuan mempersiapkan manusia penalar yang semakin berbudi dan berbudaya. Kurikulum berbasis kompetensi yang bertujuan menghasilkan psikolog profesional dengan sendirinya lebih condong bercorak pendidikan vokasional. Oleh karena itu, untuk memberi nilai lebih sekaligus dalam rangka melanjutkan tradisi yang baik, entah dengan skenario pertama atau kedua, implementasi kurikulum berbasis kompetensi inti psikolog tersebut seyogyanya tetap memberikan ruang bagi pengembangan pribadi peserta didik calon psikolog secara utuh dan optimal, tidak terjebak dalam pragmatisme sekadar menjadikan mereka siap-pakai secara teknis untuk memasuki lapangan kerja.

Daftar Pustaka

- Bent, R.J. (1991). "The Professional Core Competency Areas" dalam R.L. Peterson, J.D. McHolland, R.J. Bent, E. Davis-Russell, G.E. Edwall, K. Polite, D.L. Singer, & G. Stricker (Eds.). *The core curriculum in professional psychology* (77-81). Washington, DC: American Psychological Association.
- Bent, R.J. & Cox, R. (1991). "Intervention Competency" dalam R.L. Peterson, J.D. McHolland, R.J. Bent, E. Davis-Russell, G.E. Edwall, K. Polite, D.L. Singer, & G. Stricker (Eds.). *The core curriculum in professional psychology* (97-102). Washington, DC: American Psychological Association.
- Bent, R.J., Schindler, N. & Dobbins, J.E. (1991). "Management and Supervision Competency" dalam R.L. Peterson, J.D. McHolland, R.J. Bent, E. Davis-Russell, G.E. Edwall, K. Polite, D.L. Singer, & G. Stricker (Eds.). *The core curriculum in professional psychology* (121-126). Washington, DC: American Psychological Association.
- Gold, S.N. & De Piano, F. (1991). "Assessment Competency" dalam R.L. Peterson, J.D. McHolland, R.J. Bent, E. Davis-Russell, G.E. Edwall, K. Polite, D.L. Singer, & G. Stricker (Eds.). *The core curriculum in professional psychology* (89-95). Washington, DC: American Psychological Association.
- Healy, M. & Franklin, J. (1998). "Psychologist Registration Boards' Views on Four and Six-Year Education". *Australian Psychologist*, 33, 213-216.
- Houston, W.R. (1974). "Competency-based Education" dalam W.R. Houston (Ed.). *Exploring competency-based education* (3-15). Berkeley, CA: McCutchan.
- Illback, R.J., Maher, C.A., & Kopplin, D. (1991). "Consultation and Education Competency" dalam R.L. Peterson, J.D. McHolland, R.J. Bent, E. Davis-Russell, G.E. Edwall, K. Polite, D.L. Singer, & G. Stricker (Eds.). *The core curriculum in professional psychology* (115-120). Washington, DC: American Psychological Association.
- Keputusan Mendikbud RI Nomor 0324/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku secara nasional Program Sarjana Psikologi. Jakarta: 9 Desember 1994.
- Keputusan Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Jakarta: 2 April 2002.
- Perlman, B. & McCann, I. (1999). "The Most Frequently Listed Courses in the Undergraduate Psychology Curriculum", *Teaching of Psychology*, 26, 177-182.
- Polite, K. & Bourg, E. (1991). "Relationship Competency" dalam R.L. Peterson, J.D. McHolland, R.J. Bent, E. Davis-Russell, G.E. Edwall, K. Polite, D.L. Singer,

- & G. Stricker (Eds.). *The core curriculum in professional psychology* (83-88). Washington, DC: American Psychological Association.
- Rice, C.E. (1997). "The Scientist-Practitioner Split and the Future of Psychology", *American Psychologist*, 52, 1173-1181.
- Setiadi, B.N. (1998). "Latar Belakang Pemikiran Kurikulum Nasional Pendidikan Psikologi" dalam *Proceeding Lokakarya Pengembangan Kurikulum Nasional Pendidikan Psikologi/Profesi*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Sinopsis hasil diskusi /lokakarya* (2201)
- Supratiknya, A. (2001). "Problem-based Learning. Aplikasinya dalam Program Pendidikan Profesi Psikolog" dalam Y.B. Cahya Widiyanto, V. Didik Suryo Hartoko, C. Siswa Widyatmoko, & Agus Suwignyo (Eds.). *Bunga rampai psikologi 2* (3-33). Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma.
- Trierweiler, S.J. & Stricker, G. (1991). "Research and Evaluation Competency: Training the Local Clinical Scientist" dalam R.L. Peterson, J.D. McHolland, R.J. Bent, E. Davis-Russell, G.E. Edwall, K. Polite, D.L. Singer, & G. Stricker (Eds.). *The core curriculum in professional psychology* (103-113). Washington, DC: American Psychological Association.
- Weiss, B.J. (1991). "Toward a Competency-based Core Curriculum in Professional Psychology: A Critical History" dalam R.L. Peterson, J.D. McHolland, R.J. Bent, E. Davis-Russell, G.E. Edwall, K. Polite, D.L. Singer, & G. Stricker (Eds.). *The core curriculum in professional psychology* (13-21). Washington, DC: American Psychological Association.